

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Tujuan penting reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. LKPD harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan.

Beberapa tahun terakhir, pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dari berbagai laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai. Selain itu juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah.

Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 520 LKPD yang dilaporkan dalam IHPS II Tahun 2017 menemukan 1.427 kasus kelemahan Sistem Pengendalian Intern

(SPI) yang meliputi kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan kelemahan struktur pengendalian intern. (indosiar.com, 10 Januari 2017). Masih banyaknya fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah membuat tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*) meningkat. Hal itu juga yang telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik.

Pemilihan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus sebagai objek penelitian karena dinilai berhasil menyusun dan menyajikan Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2017 dengan capaian tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Akan tetapi, ditahun yang sama pula di karisidenan Pati, hanya Kota Kudus yang berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangannya. Predikat WTP ini bisa diartikan bahwa pemerintah sudah menjalankan pengelolaan keuangan dan aset secara benar sesuai aturan sebagai perwujudan dari komitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan transparan (*good governance*) dalam menjalankan pemerintahan yang akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. jumlah laporan keuangan kementerian dan lembaga (LKKL) serta laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) meningkat. Berdasarkan data BPK, pada tahun 2016 dari 51 dari 82

laporan keuangan kementerian dan lembaga atau sekitar 67 persen di antaranya memperoleh predikat WTP. Dan pada 2015 meningkat yaitu menjadi 71 dari 92. Selain itu, walaupun peningkatan jumlah daerah yang mendapat WTP tidak sebaik di kementerian, trennya terus meningkat.

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Satu diantaranya pengguna laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat berkepentingan dengan laporan keuangan pemerintah daerah, karena mereka telah menyerahkan sumber daya keuangan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Jadi, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang dapat menunjukkan kondisi sebenarnya. Seperti yang kita ketahui, proses penyusunan laporan keuangan merupakan proses terpenting dari suatu organisasi untuk mengetahui bagaimana kinerja atau eksistensi suatu organisasi dalam satu periode, maka dari itu jika tidak didukung dengan kompetensi yang dimiliki staf akuntansi sendiri maka penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal tidak dapat berjalan dengan efektif dan tidak bisa menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi yang dapat dipakai oleh pengguna informasi tersebut. (Udiyanti dkk, 2014). Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten untuk menghasilkan sebuah Laporan Keuangan yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan Laporan Keuangan

Daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam Akuntansi pemerintahan, Akuntansi keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada OPD di Kudus, yang meliputi gaya kepemimpinan, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan standar akuntansi pemerintahan. Faktor yang pertama gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku yang dirancang untuk mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan individu untuk tujuan tertentu (Heidjracman, 2002:224). Hasibuan (2010: 167) Gaya kepemimpinan merupakan pemimpin yang menjalankan fungsi kepemimpinannya dengan segenap keterampilan dan sikapnya. Gaya kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin bersikap, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan orang lain dalam mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu. Menurut Fontanella (2010) menyatakan gaya kepemimpinan sebagai bagian dari kapasitas SDM merupakan salah satu elemen kunci dalam penyediaan dan pemanfaatan laporan keuangan pemerintah. Agung dan Gayatri (2018) menarik kesimpulan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan menurut Siahaan dan Fachruzamman (2016) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laporan keuangan.

Faktor yang kedua adalah kompetensi sumber daya manusia. Menurut Widodo (2001) menyatakan kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan

sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Wati, dkk (2014) menyatakan bahwa kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan peneliti Syarifudin (2014) menyatakan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sumber daya manusia yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Irawan (2016) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif.

Faktor yang ketiga adalah sistem pengendalian intern. Menurut Rai (2018:283) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal merupakan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasaraannya. Rahmawati, dkk (2012:8) menjelaskan bahwa Sistem pengendalian internal merupakan proses yang dijalankan untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum, dan efektivitas dan efisiensi operasi. Sa'adah, dkk (2018) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Agung dan gayatri (2018) menyatakan bahwa sistem sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor yang keempat adalah komitmen organisasi. Menurut Luthan (2006:249) Komitmen organisasi menunjukkan loyalitas seorang anggota

organisasi untuk tetap bertahan dalam organisasi serta keinginan untuk berusaha memberikan hasil kerja yang terbaik bagi kepentingan organisasi itu sendiri. Nopprial (2015) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Agung dan Gayatri (2018) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor yang kelima adalah pemanfaatan teknologi. Menurut Mulyadi (2010) Teknologi merupakan mesin untuk menjalankan sistem informasi. Teknologi menangkap masukan, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan menyampaikan keluaran, serta mengendalikan seluruh sistem. Dalam sistem informasi berbasis komputer, teknologi terdiri dari tiga komponen yaitu komputer, penyimpanan data diluar, telekomunikasi, dan perangkat lunak. Karmila (2014) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Selain itu, hal yang mendasar dan penting dari penerapan Akuntansi di dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah salah satunya adalah Sistem Akuntansi. Berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, sistem akuntansi keuangan daerah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah. Hal ini didukung dari penelitian Roviyantje (2011:21) yang menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Diani (2009:11) yang

menunjukkan keberadaan sistem akuntansi keuangan daerah tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hal lain yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern yang memiliki tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. (Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).

Sistem Pengendalian Intern (SPI) memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam proses akuntansi terutama dalam menciptakan keandalan laporan keuangan. Sehingga penerapan sistem pengendalian intern mampu meningkatkan reliabilitas, objektivitas informasi dan mencegah inkonsistensi dan memudahkan proses audit laporan keuangan. semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik pula. (Mahaputra, 2014).

Hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten di muka dan hasil pemeriksaan BPK RI atau LKPD mendorong penulis untuk meneliti kembali pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dengan objek penelitian Kabupaten Kudus. Pemilihan OPD kabupaten Kudus sebagai objek penelitian karena kabupaten Kudus dinilai cukup berhasil menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mengalami peningkatan opini.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Agung dan Gayatri (2018) yang menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Peneliti terdahulu yang tidak konsisten, menyebabkan peneliti tertarik untuk menguji kembali kualitas laporan keuangan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Agung & Gayatri (2018) yaitu pada penelitian ini yaitu menambahkan variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan dan penelitian terdahulu dilakukan di kabupaten karangasem.

Berdasarkan uraian diatas dan didukung dengan fakta-fakta yang ada, penulis ingin menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD dengan judul **“Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada OPD se-Kabupaten Kudus)”**

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup pembatasan dalam penelitian ini:

- 1) Membatasi variabel tentang Gaya Kepemimpinan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
- 2) Membatasi yang diteliti di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus.

### 1.3 Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu

1. Apakah Gaya Kepemimpinan Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus?
2. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia, Positif Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus?
3. Apakah Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus?
4. Apakah Komitmen Organisasi Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus?
5. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus?
6. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berbagai pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan serta lebih mendalami dan memahami lagi mengenai kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
  - b. Diharapkan sebagai masukan dan tambahan pengetahuan di bidang pemerintahan, khususnya pengaruh Gaya Kepemimpinan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kota Kudus untuk mengetahui arti pengaruh gaya kepemimpinan, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Kudus.

